

Implementasi Kebijakan Program Petani Mandiri Terhadap Kebermanfaatan dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Petani di Desa Dander Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Andan Pusposeruni¹, Boedijono², Suji³

andanseruni11@gmail.com

Abstract

Program Petani Mandiri (PPM) is a grant in the form of capital in the form of goods to farmers to provide welfare and independence for farmers. The research examines the implementation of the Program Petani Mandiri (PPM) for its benefits in improving the economic welfare of farmers in Dander Village, Dander District, Bojonegoro Regency. The Data collection techniques used were observation, interview, and documentation. Through interview with 2 agricultural instructors and 6 farmer group administrators in Dander Village, it was found that there were several problems in the process of implementing the Program Petani Mandiri money grant assistance, namely communication between the implementers and the target group and the lack of competence and lack of farmer group administrators, which hampered the implementation of the grant assistance. Apart from that, both before and after Program Petani Mandiri was implemented, there was no behavior of farmers in Dander Village that showed the characteristics of independent farmers. Providing assistance in the form of seeds and fertilizer can be said to be less useful if there is no change in behavior that leads to farmer independence.

Keywords: *policy implementation, Program Petani Mandiri, Dander Village, Dander District, Bojonegoro Regency*

Abstrak

Program Petani Mandiri (PPM) adalah bantuan hibah berupa barang kepada petani untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian petani. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Program Petani Mandiri terhadap kebermanfaatan dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui wawancara dengan 2 orang penyuluh pertanian dan 6 orang pengurus kelompok tani di Desa Dander ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri, yaitu komunikasi antara implementor dengan kelompok sasaran dan kurangnya kompetensi pengurus kelompok tani sehingga menghambat implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri. Selain itu baik sebelum maupun setelah Program Petani Mandiri dilaksanakan, tidak ada perubahan perilaku petani di Desa Dander yang menunjukkan ciri petani mandiri. Pemberian bantuan berupa benih dan pupuk dapat dikatakan kurang bermanfaat apabila tidak ada perubahan perilaku yang mengarah pada kemandirian petani.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Petani Mandiri, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro

^{1,2,3} Universitas Jember

1. Pendahuluan

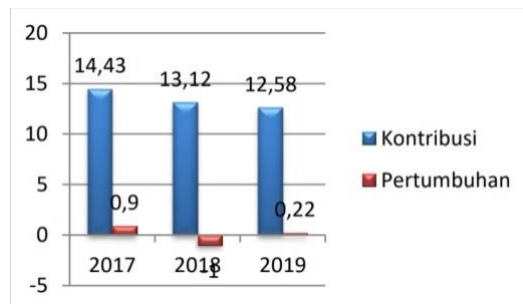
Sektor pertanian masih menjadi mata pencarian primadona bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, mengingat secara demografis wilayah Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh kawasan daratan yang subur sehingga mendukung untuk mengembangkan usaha pertanian. Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada tabel 1.berikut:

Tabel 1. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan

Mata Pencaharian	Persentase
Pertanian	39,52%
Jasa	38,31%
Industri	22,12%

Sumber: Laporan Eksekutif Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat dimaknai bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Bojonegoro bekerja sebagai petani. Kabupaten Bojonegoro menjadi penghasil padi tertinggi ke 3 di Provinsi Jawa Timur dengan penyerapan tenaga kerja 39% dari total penduduk. Pertanian menjadi tumpuan utama bagi sektor ekonomi non migas di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pertanian di Kabupaten Bojonegoro terhadap PDRB pada tahun 2017 sampai tahun 2019 pada grafik berikut:



Gambar 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Pertanian di Kabupaten Bojonegoro

Sumber: Badan Pusat Statistika Bojonegoro, 2020

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cenderung menurun pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi permasalahan yang cukup berarti pada sektor pertanian yang disebabkan curah hujan tinggi dan kemarau panjang yang memengaruhi penurunan luas lahan panen. Selain itu petani juga disulitkan pada posisi tawar yang masih lemah. Selama ini petani hanya fokus pada kegiatan produksi dan belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan agribisnis. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menetapkan kebijakan yang mendukung pembangunan di sektor pertanian. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 sampai tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro dan Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2018 sampai tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro menempatkan sektor pertanian menjadi sektor prioritas yang perlu ditingkatkan salah satunya melalui Program Petani Mandiri.

Program Petani Mandiri (PPM) diatur dalam Perbup Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri. PPM merupakan program kerja yang dicetuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani melalui 5 akses, yaitu: bantuan hibah berupa modal, asuransi gagal panen, akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani, jaminan pembelian hasil pertanian, dan beasiswa pendidikan bagi keluarga petani. Bantuan hibah PPM merupakan salah satu akses yang memberikan bantuan modal berwujud barang senilai 10 juta rupiah. Untuk mendapatkan akses bantuan Program Petani Mandiri petani harus memenuhi syarat dan kriteria berikut: 1) terdaftar sebagai anggota kelompok tani; 2) pemilik Kartu Petani Mandiri (KPM); 3) petani pemilik lahan maupun petani penggarap dengan luas lahan maksimal 2 hektare; dan 4) tidak menerima bantuan hibah sejenis secara terus menerus.

Desa Dander merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan Program Petani Mandiri sebagai desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, baik itu petani pemilik lahan maupun petani penggarap. Desa Dander memiliki 6 kelompok tani aktif yang sudah menerima bantuan hibah uang Program Petani Mandiri. Enam kelompok tani di Desa Dander beranggotakan 1.207 petani. Agar lebih jelas mengenai kelompok tani di Kecamatan Dander dapat dilihat pada Tabel 2.berikut:

Tabel 2. Data Kelompok Sasaran Program Petani Mandiri di Desa Dander

Kelompok Tani	Anggota (Org)	Petani Penerima Manfaat (Org)	Petani Tidak Memenuhi Kriteria (Org)	Petani Tidak Mengajukan Bantuan (Org)
Lumintu	235	221	4	10
Sumber Rejeki	114	114	0	0
Subur Makmur	246	120	5	121
Kelompok Tani	Anggota (Org)	Petani Penerima Manfaat (Org)	Petani Tidak Memenuhi Kriteria (Org)	Petani Tidak Mengajukan Bantuan (Org)
Subur Makmur	190	139	0	51
Rukun Makmur	250	141	3	106
Karya Makmur	172	158	3	11
Jumlah	1.207	893	15	299

Sumber: Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander

Berdasarkan tabel di atas sebanyak 299 dari jumlah anggota poktan merupakan petani yang memenuhi kriteria namun tidak mengajukan bantuan PPM. Petani yang tidak mengajukan bantuan hibah uang PPM dikarenakan kurangnya informasi terkait PPM sehingga tidak mengajukan bantuan. Informasi terkait bantuan hibah uang PPM yang tidak tersampaikan dengan baik menunjukkan bahwa terdapat masalah atau kendala selama proses implementasinya.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (sebagaimana dikutip dalam Wahab, 2008:65), implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

implementasi kebijakan, yakni kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata kepada masyarakat. Salah satu objek dalam implementasi adalah program. Program merupakan rencana atau rancangan struktur yang dibuat oleh organisasi atau badan pemerintah dengan tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa implementasi program merupakan penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan. Menurut George Edward III (sebagaimana dikutip dalam Kasmad, 2016:58) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat konsep yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ke empat konsep tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan maksimal agar implementasi suatu program tidak gagal sehingga tujuan dari program tersebut dapat terwujud dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Silalahi (sebagaimana dikutip dalam Sellang, 2016:6), administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan menyusun dan mencatat data atau informasi dengan sistematis, sehingga administrasi dapat disebut sebagai tata usaha (*clericalwork, office work*). Sedangkan dalam arti luas, P. Siagian (sebagaimana dalam Sellang, 2016:7), mengartikan administrasi sebagai rangkaian proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara guna dan berhasil guna.

Sementara itu, H. George Frederickson (sebagaimana dikutip dalam Pasolong, 2012: 46), menjelaskan konsep “publik” dalam lima perspektif yaitu: 1) publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat; 2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri; 3) publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara”; 4) publik sebagai kinsmen yang menuntut pelayanan birokrasi; dan 5) publik sebagai warga negara. Di samping itu menurut Yogi (sebagaimana dikutip dalam Sellang, 2016:41), kata publik merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, yaitu *public*, dalam Bahasa Indonesia kata publik identik dengan masyarakat. Oleh sebab itu dapat dimaknai bahwa publik merupakan masyarakat madani, baik pemerintah maupun kelompok masyarakat yang memiliki wewenang untuk menjalankan amanah demi mewujudkan tujuan bersama.

Kebijakan Publik

Thoah (2005:59), menyatakan bahwa dalam arti luas kebijakan memiliki dua aspek utama yang dapat dipaparkan, yaitu: a) kebijakan merupakan praktika sosial, dalam hal ini kebijakan bukan *event* yang tunggal dan terisolir. Artinya, kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan hasil dari berbagai kejadian dalam kehidupan bermasyarakat dan digunakan pula untuk kepentingan masyarakat, dan

b) kebijakan adalah peristiwa yang terjadi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik atau untuk menciptakan *incentive* bagi tindakan bersama dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan tujuan, tapi dalam pelaksanaannya mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak rasional. Berdasarkan kedua aspek pokok tersebut dapat dimaknai bahwa di satu sisi kebijakan merupakan bentuk dari usaha yang kompleks dari masyarakat untuk masyarakat dan di sisi lain merupakan cara untuk menyelesaikan konflik di kehidupan bermasyarakat. Sementara itu menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (sebagaimana dikutip dalam Thoha, 2005:61), kebijakan dirumuskan sebagai suatu keputusan yang teguh dan bersifat konsisten dan terdapat pengulangan pada orang-orang yang membuatnya maupun bagi orang-orang yang melaksanakannya. Artinya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pelaksanaannya menekankan sikap atau perilaku yang konsisten dan berulang.

Kebijakan publik ditetapkan melalui proses yang kompleks, sebab proses pembuatannya melibatkan banyak variabel yang harus dikaji. Oleh sebab itu para ahli politik membagi proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap, dengan tujuan memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut Winarno (2012:36) yaitu: a) penyusunan agenda; b) formulasi kebijakan; c) adopsi kebijakan; d) implementasi kebijakan; dan e) evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Meter dan Horn (sebagaimana dikutip dalam Kasmad, 2013:31) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun menurut Mulyadi (2016:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Berdasarkan definisi di atas dapat dimaknai bahwa pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok, baik itu kelompok pemerintah maupun kelompok swasta, untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:11), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh para ahli tersebut diakumulasikan menjadi model-model implementasi yang digunakan untuk menyederhanakan realita proses implementasi kebijakan yang rumit dan kompleks, sehingga menjadi lebih sederhana. George Edward III (sebagaimana dikutip dalam Kasmad, 2013:56) menanamkan model implementasi kebijakannya adalah *direct and indirect impact on implementation*. Model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap

implementasi kebijakan. Konsep yang memengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edwars III yaitu: a) komunikasi; b) sumber daya; c) disposisi; dan d) struktur birokrasi.

Bantuan Hibah Uang PPM

Bantuan Hibah Program Petani Mandiri (PPM) adalah hibah modal yang berwujud barang kepada petani yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian bagi petani. Berdasarkan Perbup Bojonegoro No. 49 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri, untuk mengakses bantuan modal PPM petani harus memiliki Kartu Petani Mandiri dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki/menggarap lahan pertanian paling luas 2 Ha; b) bergabung dalam kelompok tani setempat; c) petani pemegang Kartu Petani Mandiri; dan d) tidak menerima bantuan sejenis secara terus menerus setiap tahun.

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan positivistik dengan analisis data kualitatif, menggunakan model implementasi menurut George Edward III (1980) dalam Kasmad (2013:56), 4 komponen dalam model implementasi menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Dander. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April - Mei 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci, sementara untuk penentuan informan utama menggunakan teknik *snowball sampling* atau rekomendasi dari informan kunci. Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu dengan menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman dan Saldana, 2014:12).

3. Hasil dan Diskusi

Desa Dander merupakan salah satu desa di Kecamatan Dander yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, sehingga bantuan hibah uang PPM menjadi program yang penting untuk diimplementasikan oleh masyarakat Desa Dander. Sebagian besar masyarakat Desa Dander bermata pencaharian sebagai petani, baik itu petani pemilik lahan, petani penggarap atau buruh tani. Saat ini di Desa Dander terdapat 6 kelompok tani dengan 1.207 anggota aktif. Data luas lahan petani yang aktif dalam kelompok tani di Desa Dander dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Luas Wilayah Desa Dander

Luas Lahan Pertanian (Ha)	Jumlah Petani
< 1 Ha	1.159
1 – 2 Ha	33
> 2 Ha	15
Jumlah	1.207

Sumber: PPL Kecamatan Dander

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 1.207 keluarga petani di Desa Dander telah aktif dalam kelompok tani. Dengan aktif mengikuti kelompok tani para petani mendapatkan banyak manfaat, salah satunya akan lebih mudah mendapat akses bantuan dari pemerintah yang dapat membantu untuk mengembangkan usaha tani dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian para petani. Implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander berpedoman pada Perbup Bojonegoro No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri dan Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Uang PPM yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Pada proses implementasinya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi bantuan hibah uang PPM di Kecamatan Dander. Beberapa faktor tersebut dianalisis dengan berpedoman pada model implementasi George C. Edward III (1980), yakni dengan konsep komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Soebarsono (2021:90) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini maksud dan tujuan dari kebijakan harus ditransmisikan kepada para implementor dan kelompok sasaran dengan membangun komunikasi baik antar implementor maupun implementor dengan kelompok sasaran. Pada implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander, komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran dibangun melalui sosialisasi yang umumnya dilaksanakan satu tahun sekali. Selain itu, informasi terkait bantuan hibah uang PPM juga disampaikan pada setiap perkumpulan kelompok tani.

Namun berdasarkan keterangan dari pengurus kelompok tani cara tersebut tidak cukup efektif untuk mentransmisikan informasi bantuan hibah uang PPM kepada kelompok sasaran. Terdapat beberapa permasalahan terkait komunikasi antar pengurus kelompok tani dan petani di Desa Dander yaitu ketidakhadiran beberapa petani dalam sosialisasi ataupun perkumpulan poktan. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik berimplikasi terhadap kendala pengumpulan berkas untuk pengajuan bantuan.

Pengurus kelompok tani memiliki strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni dengan terjun langsung menyampaikan informasi terkait bantuan hibah uang PPM dan proses pendataan kepada kelompok sasaran secara *door to door*. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyampaian informasi secara *door to door* kurang efektif untuk menyampaikan informasi. Beberapa petani tidak menerima informasi karena keterbatasan waktu dan pengurus yang menyebarkan informasi sehingga sebagian petani tidak mengajukan bantuan hibah uang PPM.

Berdasarkan pengamatan dan analisa komunikasi yang dilakukan oleh implementor dan kelompok sasaran secara sosialisasi maupun *door to door* belum berjalan dengan efektif dan efisien. Komunikasi yang belum dibangun dengan baik menyebabkan petani tidak mendapatkan informasi dan terlambat untuk mengajukan bantuan. Apabila dilihat berdasarkan model implementasi George C. Edward III yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini dapat dikatakan belum memenuhi dan mengisi konsep komunikasi dalam model implementasi George C.

Edward III, sebab komunikasi yang seharusnya dibangun untuk meminimalisir resiko terjadinya kegagalan implementasi program tidak dilaksanakan dengan baik.

Sumber Daya

Pada implementasi bantuan hibah uang PPM di Kecamatan Dander terdapat beberapa kendala pada konsep sumber daya seperti terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pengurus kelompok tani dalam menggunakan teknologi. Hal ini disebabkan karena umumnya pengurus kelompok tani merupakan petani-petani yang berusia lanjut dan tidak bisa mengoperasikan komputer, sehingga harus ada pengurus yang memiliki tugas rangkap. Permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius karena menghambat implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander, sehingga proses pengajuan bantuan menjadi terlambat. Terkait dengan kelancaran pendanaan bantuan hibah uang PPM di Desa Dander, Koordinator Penyuluh Pertanian menyatakan bahwa sejak bantuan hibah uang PPM diimplementasikan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluruh kelompok tani di Desa Dander sudah menerima bantuan hibah uang PPM. Rincian kelompok tani penerima bantuan hibah uang PPM dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. Kelompok Tani Penerima Manfaat di Desa Dander

Tahun	Kelompok Tani	Pengurus Poktan (Org)	Bisa Mengoperasikan Komputer (Org)	Tidak Bisa Mengoperasikan Komputer (Org)
2020	Lumintu	3	1	2
	Sumber Rejeki	3	0	3
	Subur Makmur	3	1	2
2021	Subur	3	1	2
	Rukun Makmur	3	0	3
	Karya Makmur	3	0	3
Jumlah		18	3	15

Sumber : Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander

Tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh kelompok tani di Desa Dander sudah menerima Bantuan hibah uang PPM pada tahun 2020 dan 2021. Namun dalam implementasinya mengalami kendala pada proses penyusunan proposal bantuan hibah uang PPM, karena keterbatasan kemampuan pengurus kelompok tani dalam mengoperasikan komputer. Pada tabel di atas sebanyak 3 pengurus kelompok tani bisa mengoperasikan komputer, tapi belum memanfaatkan teknologi untuk pengembangan agribisnis di Desa Dander. Sementara itu 15 pengurus kelompok tani di Desa Dander tidak bisa mengoperasikan komputer, yang mana pengurus kelompok tani Lumintu dan Subur menyatakan bahwa faktor usia menjadi alasan ketidakmampuan pengurus kelompok tani dalam mengoperasikan komputer ataupun mengikuti pelatihan penggunaan komputer.

Berdasarkan pengamatan dan analisa sumberdaya pada implementasi Program Petani Mandiri di Desa Dander tidak cukup dan cakap untuk memenuhi standar sumber daya menurut model implementasi menurut George C. Edward III (1980). Sebab implementor yang seharusnya membantu kelancaran implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri justru menimbulkan permasalahan baru yang

menghambat implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri di Desa Dander.

Disposisi

Faktor lain yang memengaruhi proses implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander adalah sikap atau kepatuhan dari implementor terhadap SOP (Standard Operasional Prosedur) yang berpedoman pada Perbup Bojonegoro No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri. Pada proses implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander, terdapat petani yang sebelumnya tidak ikut mengajukan bantuan tapi meminta bagian pada saat distribusi benih dan pupuk. Dalam hal ini terjadi kesalahpahaman terkait distribusi bantuan. Namun implementor berusaha menjelaskan bahwa bantuan hanya disampaikan kepada petani-petani yang sudah mengajukan bantuan dengan mengumpulkan fotokopi KK, KTP, SPPT dan KPM sebagai syarat mendapatkan bantuan hibah uang PPM.

Kepatuhan implementor program dapat ditunjukkan dengan terlaksanakannya isi dari peraturan tersebut, yaitu: 1) bantuan telah tersampaikan kepada seluruh Kelompok Tani di Desa Dander; 2) bantuan didistribusikan oleh pengurus kelompok tani dibawah pengawasan penyuluhan pertanian Kecamatan Dander; dan 3) petani penerima manfaat bantuan hibah uang PPM telah sesuai dengan kriteria dan syarat yang tercantum dalam peraturan. Hal tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan bahwa implementor patuh terhadap peraturan yang digunakan sebagai pedoman, yang apabila dianalisa kegiatan tersebut memiliki kesesuaian dengan dimensi variabel disposisi model implementasi George C. Edward III (1980)

Struktur Birokrasi

Pada implementasi bantuan hibah uang PPM di Kecamatan Dander, implementor berpedoman pada Perbup Bojonegoro No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Bojonegoro No. 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri dan Petunjuk Teknis Bantuan Hibah Uang Program Petani Mandiri yang diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang berisi tentang penetapan petani penerima manfaat, sumber pendanaan, mekanisme pelaksanaan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun kriteria dan syarat dari petani penerima manfaat bantuan hibah uang PPM adalah sebagai berikut:

1. Kepala Keluarga yang memiliki lahan/pemilik lahan dan melakukan usaha tani/usaha budidaya tanaman pangan khususnya padi/jagung, tanaman hortikultura khususnya bawang merah, tanaman perkebunan khususnya tembakau, pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
2. Kepala keluarga yang tidak memiliki lahan namun menggarap lahan/penggarap dan melakukan usaha tani/usaha budidaya tanaman pangan khususnya padi dan jagung tanaman hortikultura khususnya bawang merah, tanaman perkebunan khususnya tembakau, pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
3. Luas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) yang berasal dari penggabungan beberapa lahan di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro;
4. Lokasi lahan di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro dan lahan dikawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Perhutani.

Selain memenuhi kriteria di atas, petani penerima manfaat juga harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam petunjuk teknis bantuan hibah uang PPM, yakni sebagai berikut:

1. Kepala keluarga petani yang menjadi anggota di salah satu POKTAN di desa/kelurahan/desa lokasi lahan setempat dan pemegang KPM plus;
2. POKTAN sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
3. Kelompok Tani yang tidak menerima bantuan yang sama/sejenis, tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran dari Pemerintah Daerah;
4. Bantuan Hibah diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga petani 1 (satu) rumah/tempat tinggal yang berada dalam alamat yang sama;
5. Kepala keluarga petani sebagaimana huruf (c) diusulkan oleh POKTAN kepada Bupati diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
6. Kepala keluarga petani melampirkan:
 - a) fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
 - c) fotokopi Sertifikat Kepemilikan Tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB;
 - d) Surat Keterangan pemilik/penggarap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - e) Surat Keterangan dari Administratur Perum Perhutani disertai dengan fotokopi perjanjian kerjasama (PKS) bagi anggota Kelompok Tani yang mengelola lahan kawasan hutan;
 - f) surat pernyataan tidak mendapatkan bantuan yang sama/sejenis, tidak secara terus menerus/bantuan tahun sebelumnya dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

SOP yang digunakan sebagai pedoman implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander dapat dikatakan cukup jelas dan rinci sehingga tidak membingungkan implementor program dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator kesesuaian implementasi bantuan hibah uang PPM dengan konsep struktur birokrasi dari model implementasi George C. Edward III (1980). Meskipun terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP pada proses distribusi bantuan, tapi kendala tersebut dapat teratasi dengan memberikan arahan atau pengertian kepada petani yang tidak mendapatkan bantuan bahwa bantuan harus disampaikan kepada petani yang sudah mengajukan bantuan hibah uang Program Petani Mandiri.

Menurut Jones (dalam Andani, Setyowati, dan Amin, 2019: 330), implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. Salah satu model implementasi program adalah model dari David C. Korten (Akib & Tarigan, 2008), yang menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat kesesuaian dari 3 unsur implementasi program, yaitu: 1) Kesesuaian antara program dan pemanfaatan; 2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana; dan 3) kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Pada implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri di Desa Dander terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan kurangnya komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran serta kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga menghambat implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri di Desa Dander. Sehingga dapat dimaknai bahwa kurangnya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana bantuan hibah uang PPM di Desa Dander membuat implementasi program tidak berhasil.

Sementara itu menurut Egonwan dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:65), keberhasilan dalam implementasi kebijakan akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memberikan manfaat kepada kelompok sasaran atau menciptakan suatu kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Bantuan hibah uang PPM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Salah satu akses yang disediakan adalah bantuan hibah uang PPM yang didistribusikan kepada petani penerima manfaat dalam bentuk benih dan pupuk. Dengan pemberian benih dan pupuk diharapkan dapat memudahkan petani dalam mendapatkan benih dan pupuk yang berkualitas, mengingat jumlah dari pupuk subsidi yang terbatas, sehingga produksi pertanian juga meningkat dan berimplikasi terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Namun pada implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander terjadi beberapa permasalahan menjadikan Program Petani Mandiri tidak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian petani di Desa Dander.

Adanya benih dan pupuk diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian petani yang berimplikasi terhadap kesejahteraan ekonomi. Namun produksi pertanian di Desa Dander mengalami penurunan sejak tahun 2018 dan belum mengalami kenaikan sampai tahun 2022. Data terkait produksi pertanian di Desa Dander dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Luas Lahan dan Produksi Pertanian Desa Dander

Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Persentase Penurunan
2018	355,71	70.181	65
2019	355,71	24.501	0
2020	355,71	24.501	0
2021	355,71	24.501	0
2022	355,71	24.501	0

Sumber : [Kecamatan Dander dalam angka tahun 2018 – 2022](#)
(Diakses tanggal 15 November 2023)

Penurunan sebesar 65% disebabkan karena faktor alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Pemberian bantuan hibah uang Program Petani Mandiri dalam bentuk benih dan pupuk tidak menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan petani di Desa Dander. Selain itu pemberian bantuan benih dan pupuk dapat dikatakan tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani tanpa diiringi perubahan perilaku petani di Desa Dander.

Berdasarkan pengamatan dan analisa tidak ada perubahan perilaku petani di Desa Dander dari sebelum sampai setelah implementasi bantuan hibah uang Program Petani Mandiri. Mayoritas petani di Desa Dander memproduksi tanaman pangan

seperti padi, jagung, singkong, dan kacang tanah. Petani cenderung bertani untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya saja tidak memperhitungkan keuntungan yang didapat dari produk yang dihasilkan. Terlebih produk yang dijual adalah produk mentah yang membutuhkan biaya transportasi besar pada proses panen dan pemasaran. Selain itu harga hasil panen bagi tanaman pangan di pasaran juga tidak kompetitif bahkan cenderung merendahkan petani. Biaya panen dan pasca panen yang tinggi menyebabkan petani di Desa Dander terus-menerus mengalami ketergantungan terhadap tengkulak. Para petani yang tidak mengikuti perkembangan teknologi dan informasi semakin bergantung pada tengkulak dan harus menerima berapapun harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Sementara itu adanya bantuan pupuk phonska justru semakin membuat petani ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik. Harga pupuk yang tinggi dan dosis yang terus bertambah pada setiap musim tanam semakin membengkakkan biaya tanam dan perawatan petani, sehingga adanya bantuan pupuk membuat petani terus berharap menerima bantuan dari pemerintah. Hal tersebut tidak sesuai dengan ciri dari petani mandiri, yaitu petani yang kreatif dan mampu mengelola pertaniannya tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan Program Petani Mandiri terhadap kebermanfaatannya dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi petani di Desa Dander terdapat beberapa permasalahan yang menghambat proses implementasi bantuan hibah uang PPM. Beberapa permasalahan yang terjadi yaitu, komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran melalui sosialisasi maupun secara *door to door* kurang efektif dan efisien dalam penyampaian informasi serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengurus kelompok tani dalam mengoperasikan komputer sehingga menghambat proses pendataan dan penyusunan proposal pengajuan bantuan. Adanya beberapa permasalahan yang terjadi pada implementasi bantuan hibah uang PPM di Desa Dander menjadikan program ini tidak bisa mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan produksi pertanian di Desa Dander sejak tahun 2018 dan belum mengalami kenaikan sampai tahun 2022. Selain itu setelah bantuan hibah uang PPM diimplementasikan tidak menunjukkan adanya perubahan perilaku kemandirian petani. Petani di Desa Dander cenderung tetap menanam tanaman pangan semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperhitungkan keuntungan yang lebih besar, petani di Desa Dander belum sadar pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga pemasaran hasil panen sepenuhnya masih bergantung pada tengkulak, dan pemberian bantuan pupuk phonska justru semakin membuat petani ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik sehingga petani terus mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Saran

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani perlu adanya usaha untuk membentuk petani yang kreatif dan mandiri dengan cara sebagai berikut: a) melibatkan ketua RT/RW setempat untuk berkomunikasi dengan petani sehingga informasi terkait kegiatan poktan dapat tersampaikan dengan efektif; b) perlu adanya pelatihan kepada pengurus poktan terkait penggunaan media informasi dan aplikasi

berbasis internet, bagi pengurus poktan yang masih sanggup untuk mengikuti perkembangan teknologi; c) melakukan *reshuffle* atau pergantian pengurus poktan menjadi pengurus yang lebih muda dan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi sehingga petani dapat berinteraksi dengan pedagang hasil pertanian dan konsumen secara langsung melalui aplikasi seperti Tani Link dan Pak Tani Digital; d) memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petani terkait *diferensiasi produk* pertanian. Selain menanam padi, petani bisa mencoba tanaman lain seperti rempah-rempah atau buah-buahan yang cocok ditanam di daerah panas. Hasil panennya tidak dijual sebagai bahan mentah, namun harus melewati proses pengolahan dengan demikian petani bisa memiliki UMKM sebagai penambah penghasilan; dan e) memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik agar petani tidak ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik. Misalnya penggunaan asam humat cair yang tidak membutuhkan banyak biaya. Dengan penggunaan pupuk organik, petani bisa menekan biaya perawatan dan tidak mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah terkait pemberian pupuk.

Daftar Pustaka

- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Baca Agustus*, 1.1-19.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2018). Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Bojonegoro 2018. Diakses pada 6 November 2022 dari <https://bojonegorokab.bps.go.id>.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.(2022). *Data Produksi Pertanian*. Diakses pada 3 Februari 2023 dari <https://data.bojonegorokab.go.id/dinas-ketahanan-pangan.html@detail=produksi-pertanian>.
- Fatihudin, D.. (2015). *Metode Penelitian: Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Kasmad, R..(2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J..(2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods, Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyadi, D..(2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H.(2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Program Petani Mandiri.
- Purwanto, E. A., dan Sulistyastuti, D. R..(2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sellang, K..(2016). *ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Subarsono, AG.. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Thoha, M.. (2005). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi.. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.